



Judul : Susun RUU Energi Hijau, Parlemen Menggandeng IPB
Tanggal : Senin, 08 Februari 2021
Surat Kabar : Kontan
Halaman : 13

Susun RUU Energi Hijau, Parlemen Menggandeng IPB

JAKARTA. Komisi VII DPR RI bersama Institut Pertanian Bogor menggelar Forum Group Discussion (FGD). Kegiatan ini sebagai langkah persiapan untuk memperkaya dan memperkuat substansi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai payung hukum baru dalam mendorong pemanfaatan energi bersih.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Legislasi Komisi VII DPR. Menurut dia, tantangan utama pengembangan EBT adalah *political will* dan kebijakan, perlunya badan khusus untuk percepatan EBT, mengurai hambatan investasi, infrastruktur dan teknologi, serta dominasi pasar.

"Untuk mendorong pengembangan EBT pada saat ini, maka diperlukan proteksi pasar. Sehingga amat diperlukan payung hukum baru untuk mendorong pemanfaatan EBT yang pencapaiannya baru 11%," ujar Eddy, Minggu (7/2).

RUU EBT sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2021. Pada 25 Januari 2021 telah selesai disusun naskah akademik, audiensi dan dengar pendapat juga telah selesai. Beberapa poinnya antara lain pembahasan nuklir dalam RUU EBT, perizinan badan usaha, kepastian berinvestasi dengan memperkuat prinsip *bankability* dari sisi *risk sharing* dan penentuan harga, insentif dan pendanaan.

Rektor IPB, Arif Satria bilang, naskah akademik penting sebagai dasar penyusunan regulasi, sehingga dalam penyusunan kebijakan harus berbasis pada sains/riset.

Ridwan Nanda Mulyana